

**MANAJEMEN KURIKULUM BERBASIS KEMITRAAN  
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 ROTA BAYAT  
KABUPATEN KLATEN**

Supriyanto, Muhyadi  
Program Studi Manajemen Pendidikan PPs UNY, UNY  
priyantouny@yahoo.com

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kurikulum berbasis kemitraan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* meliputi kepala sekolah, wakasek kurikulum, kaproli dan kepala bengkel kria keramik, dua guru praktik, kepala perpustakaan, koordinator NGOs TF, tiga fasilitator, konsultan kurikulum, kbid dikmen dan kasi kurikulum SMK Dinas Pendidikan Klaten. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen. Analisis meliputi: mengolah data mentah, membangun *general sense*, meng-coding, mendeskripsikan kategori/tema, menyajikan data, dan menginterpretasi data. Hasil penelitian sebagai berikut. 1) Perencanaan kurikulum dilakukan melalui proses pengintegrasian muatan keteknikan, *entrepreneurship*, dan kebutuhan pasar kerja. 2) Pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan mengelompokkan petugas kurikulum, dan mengelompokkan kurikulum menjadi mapel dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. 3) Pelaksanaan kurikulum dilakukan guru praktik dengan melaksanakan proses pembelajaran; konsultan memberikan *training*, penataran, dan supervisi kurikulum kepada guru. 4) Pengawasan kurikulum dilakukan wakasek kurikulum menggunakan instrumen pemantauan kurikulum, guru praktik dan konsultan dengan observasi terhadap pembelajaran.

**Kata kunci:** manajemen kurikulum, kurikulum, kemitraan, sekolah menengah kejuruan

**PARTNERSHIP-BASED CURRICULUM MANAGEMENT  
AT SMK NEGERI 1 ROTA BAYAT, KLATEN**

**Abstract**

*This research aims at describing the planning, organization, implementation, and controlling of the curriculum based on partnership. This research used the case study approach. The subjects were determined using the purposive methods, consisting of the school principal, the vice principal for curriculum, the head of ceramic crafts departement, the head of ceramic craft workshop, two teachers of ceramic craft, the head of the library, the coordinator of NGOs TF program, three school facilitators, the consultant of the school curriculum, the head of the Education Office of Klaten and the head of Vocational School Curriculum Office, Klaten Office of Education. The data collection employed the indepth interview technique, observation, and document analysis. The analysis was conducted by analyzing and preparing the raw data, building the general sense, data coding, describing the categories and themes, displaying the data naratively, and interpreting the data. The results of this research are as follows. 1) The curriculum planning is conducted through the process of integrating the curriculum content of engineering, entrepreneurship, and the needs of job market. 2) The curriculum organization is conducted by grouping the people based on the duties and responsibilities of practical curriculum, and grouping the curriculum to become the subjects of vocational basic competency and vocational competency. 3) The implementation of the curriculum is conducted by the practice teachers by implement the classroom activities; while the consultants conduct the trainings, upgrading, and supervising the curriculum to the teachers. 4) The monitoring process of the curriculum is done the Vice Principal of Curriculum by employing the curriculum monitoring instruments, the productive teachers and and the curriculum consultants through the participant observations towards the learning processes.*

**Keywords:** curriculum management, curriculum, partnership, vocational school

## Pendahuluan

Pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara desentralistik berlandaskan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam paradigma desentralisasi, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah membutuhkan partisipasi dan pemberdayaan seluruh komponen pendidikan. Model pengelolaan sekolah yang sesuai dengan paradigma tersebut adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Model pengelolaan ini menuntut kesadaran, komitmen, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) agar bekerja sama dalam mengembangkan sekolah. Selain itu, MBS menekankan agar sekolah menjalin kemitraan dengan masyarakat.

Kemitraan penting dilaksanakan mengingat penyelenggaraan pendidikan pada dasarnya selalu terkait dengan realitas yang berkembang dalam kehidupan kemasyarakatan. Dengan melaksanakan kemitraan, diharapkan sekolah dalam menyelenggarakan program-programnya akan mendapatkan dukungan dari berbagai sumberdaya baik berupa materi ataupun nonmateri. Selain itu, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Antone Gonsalves (2003), dengan jalinan kemitraan yang baik antara sekolah dengan mitra eksternal dapat meningkatkan mutu proses pendidikan dan kualitas lulusan (*output*).

Di Indonesia, selama ini jalinan kemitraan sekolah dengan mitra eksternal untuk meningkatkan mutu sekolah rata-rata dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta pada umumnya menjalin kemitraan dengan pihak mitra eksternal karena sekolah-sekolah tersebut memang memiliki otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar apabila dibandingkan dengan sekolah negeri. Meskipun, pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kemitraan tersebut lebih pada pihak mitra eksternal sekolah memberi dukungan pendanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah kepada sekolah-sekolah swasta sehingga pihak mitra eksternal sekolah tidak sampai terlibat dalam manajemen sekolah.

Pola lain tentang kemitraan sekolah dengan pihak eksternal dapat dijumpai di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) I ROTA Bayat Kabupaten Klaten. Di sekolah tersebut dilaksanakan suatu kemitraan yang sistematis dan komprehensif antara sekolah dengan *Nongovernmental Organizations* (NGOs) *Titian Foundation* (TF). Kemitraan tersebut dilaksanakan dalam bidang manajemen kurikulum kejuruan. Bentuk kerja sama yang dilakukan adalah NGOs TF menugaskan seorang guru besar (*Professor*) bidang keahlian kria keramik dari Jepang yakni Prof. Dr. Chitaru Kawasaki untuk mewakili TF sebagai tenaga ahli (konsultan) manajemen dan pengembangan kurikulum kejuruan kria keramik. Sebagai sekolah negeri yang umumnya kaku dan kurang fleksibel dalam mengelola sekolah karena terikat dengan aturan-aturan pemerintah, maka keberanian sekolah tersebut menjalin kemitraan dengan NGOs dalam mengelola kurikulum tentu menjadi hal yang sangat menarik, unik, dan berbeda bila dibandingkan dengan kemitraan yang dilaksanakan sekolah-sekolah lain di Indonesia.

Kemitraan sekolah dengan mitra eksternal dalam pengembangan kurikulum akan memberikan banyak manfaat. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan Jason Tomassini (2012) yang menyimpulkan bahwa jalinan kemitraan antara lembaga pendidikan dengan mitra eksternal dalam pengembangan kurikulum mampu mendorong dan memberi stimulan bagi lembaga pendidikan untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi mutakhir dalam penyelenggaraan pembelajaran. Senada dengan hasil penelitian tersebut, SMK N I ROTA Bayat sebagai sekolah yang baru berdiri tahun 2009 telah mampu mendorong peserta didiknya menghasilkan berbagai prestasi baik skala regional, nasional dan internasional.

Keberhasilan SMK N I ROTA Bayat memfasilitasi peserta didiknya untuk memperoleh berbagai prestasi tersebut, tentu salah satunya karena dukungan kurikulum yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi

pengetahuan dengan mengkaji bagaimana implementasi manajemen kurikulum berbasis kemitraan di SMKN I ROTA Bayat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan belajar (*lesson learn*) bagi setiap sekolah menengah kejuruan dalam menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga eksternal untuk meningkatkan kualitas kurikulum kejuruan. Berbagai uraian tersebut menimbulkan pertanyaan: Bagaimana implementasi manajemen kurikulum berbasis kemitraan di SMK N I ROTA Bayat?

Menurut Glatthorn & Whitehead (2009: 3) kurikulum adalah perencanaan yang dibuat untuk memandu pembelajaran di sekolah. Sementara Ornstein & Hunkins (2004: 10) mengartikan kurikulum sebagai perencanaan untuk bertindak atau dokumen tertulis yang memasukan strategi-strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah dokumen-dokumen tertulis yang berisi perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasi peserta didik. Sementara itu Suharsimi Arikunto (2009: 3) menyatakan bahwa kurikulum adalah semua pengalaman yang disediakan oleh sekolah bagi peserta didik, yang berarti kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata pelajaran namun meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik.

Brooks & Simkins (1999: 5) menegaskan bahwa mengelola kurikulum pada dasarnya merupakan program pengembangan minat dan satuan rencana pembelajaran yang dapat diserap dengan mudah dan cepat oleh peserta didik, tetapi harus tetap memperhatikan standar nasional dan daerah yang telah ditentukan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, berarti kurikulum harus didesain sesuai dengan kebijakan umum pemerintah, mampu memfasilitasi kearifan lokal yang berkembang di lingkungan sekolah, dan harus dibuat sederhana tanpa mengurangi substansi isinya dengan harapan mudah diserap oleh peserta didik.

Kegiatan pengelolaan kurikulum dimulai terdiri dari perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, implementasi kurikulum, dan pengawasan kurikulum. Menurut Omar Hamalik (2008: 152) perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sejauh mana perubahan-perubahan telah terjadi pada diri peserta didik. Perencanaan kurikulum yang matang besar sumbangannya terhadap pembuatan keputusan oleh pimpinan, dapat sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pembelajaran yang optimal, dan sebagai pedoman atau alat manajemen kurikulum.

Kurikulum yang telah direncanakan dan disusun akan bermakna setelah di implementasikan. Implementasi kurikulum pada dasarnya merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Menurut Oemar Hamalik (2008: 169), implementasi kurikulum merupakan proses pembelajaran yang merupakan realisasi prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah direncanakan atau disusun sebelumnya. Implementasi kurikulum yang optimal sangat tergantung pada kemampuan guru sendiri. Karena itu kemampuan profesional guru turut menentukan apakah suatu kurikulum dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Meskipun demikian, di kalangan guru mungkin terdapat yang mengalami kesulitan dalam prosedur pelaksanaannya dan mungkin juga ada yang merasa mendapat hambatan berkenaan dengan kelemahan dalam dimensi tertentu pada kemampuan profesionalnya. Dalam situasi ini, maka sudah tentu guru-guru bersangkutan membutuhkan bantuan, bimbingan, arahan, dorongan kerja, bahkan mungkin nasihat dan petunjuk yang berguna baginya dalam upaya pelaksanaan kurikulum tersebut.

Implementasi kurikulum di sekolah perlu dipengawasan untuk mengetahui tingkat efektifitasnya dan supaya implementasinya tidak keluar jalur. Pengawasan kurikulum secara konseptual oleh Oemar Hamalik (2008: 220) diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dan penerimaan

informasi berdasarkan data yang tepat, akurat dan lengkap tentang implementasi kurikulum yang dilaksanakan melalui langkah-langkah yang tepat dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau yang ahli dan berpengalaman untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam kurikulum.

Pemantau kurikulum harus objektif, karena objektivitas akan menentukan penilaian dan perbaikan selanjutnya. Pengawasan kurikulum memiliki peranan yang cukup penting dalam perbaikan kurikulum selanjutnya, agar lebih sempurna dan berjalan di jalur yang sesuai. Dengan demikian, secara umum pengawasan kurikulum bertujuan untuk mempercepat pengumpulan dan penerimaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam mengatasi permasalahan implementasi kurikulum, sedangkan secara khusus pengawasan kurikulum bertujuan untuk: 1) memberi umpan balik bagi kebutuhan program pendidikan, 2) memberi umpan balik bagi ketercapaian tujuan kurikulum, 3) memberi umpan balik bagi metode perencanaan, 4) memberi umpan balik bagi sistem penilaian kurikulum, dan 5) memberikan bahan kajian untuk membatasi masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Pengawasan kurikulum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, Oemar Hamalik (2008: 223) membaginya menjadi: 1) rutin, yaitu dengan mempelajari dan menelaah laporan-laporan tertulis yang telah diterima sebelumnya; 2) langsung, yaitu dengan cara mengirimkan petugas ke lembaga yang sedang melaksanakan kurikulum, dan 3) pertemuan melalui wahana komunikasi sosial yang ada.

Terkait variabel kemitraan, Mawhinney (2012: 33) menyatakan kemitraan adalah dua atau lebih lembaga yang bekerja secara bersama-sama dalam semua tahapan program atau pengembangan layanan, bersama-sama dalam perencanaan, bersama-sama dalam pengimplementasian, dan bersama-sama dalam mengevaluasi. Fasli Jalal & Dedi Supriadi (2001: 193) menyatakan hal penting yang perlu disadari dalam mengelola kemitraan di

bidang pendidikan adalah kemitraan harus dilandasi niat untuk saling menguntungkan dan didorong kesediaan dan kesiapan untuk melayani masyarakat. Dengan demikian, kesuksesan kemitraan dalam dunia pendidikan akan terwujud manakala pihak-pihak yang bermitra saling menghormati dan menghargai serta menjadikan masyarakat sebagai subjek utama yang harus dilayani.

Karen Mundy & Caroline Manion (2008) yang mengkaji tentang kemitraan yang sistematis dan komprehensif antara pemerintah, sekolah dan *Non Governmental Organizations (NGOs)* dalam pengembangan pendidikan global di Kanada, menyimpulkan bahwa apabila terjadi kelambanan dukungan dari Kementerian Pendidikan untuk mengembangkan pendidikan, maka kemitraan eksternal dengan *NGOs* sering memegang peranan kunci dalam mendukung pengembangan pendidikan global di Kanada. Peran yang diambil *NGOs* tersebut yaitu memberikan dukungan material (pendanaan), pelatihan-pelatihan pengembangan kurikulum, pemberian pelatihan pengembangan SDM guru dan staf administrasi serta membantu sekolah dalam mengembangkan akses atau jaringan terhadap lembaga eksternal lain. Memperkuat hasil penelitian tersebut, Antone Gonsalves (2003) melalui hasil penelitiannya merekomendasikan bahwa sudah saatnya di era modern saat ini, sekolah menjalin suatu jalinan kemitraan dengan lembaga-lembaga eksternal untuk mengikuti perkembangan teknologi, memberikan pengalaman praktis kepada peserta didik dan memperkaya layanan pendidikan bagi peserta didik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik permasalahan yang diangkat holistik, kompleks, dinamis, penuh makna, serta penelitian ini mengidentifikasi dan menyelidiki secara mendalam suatu kasus yaitu pengelolaan kurikulum yang dilaksanakan dengan cara

kemitraan. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* yang terdiri dari administrator kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, administrator kurikulum sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, kepala program keahlian kria keramik, para guru kria keramik), dan konsultan kurikulum kejuruan kria keramik. Data penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan analisis dokumen. Pengabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Data dianalisis secara kualitatif sebagaimana diusulkan oleh Creswell (2009: 185-189) dengan tahapan: 1) mengolah dan mempersiapkan data mentah (transkrip wawancara, *field notes*, *scanning* dokumen), 2) membangun *general sense*, 3) meng-*coding* data, 4) mendeskripsikan kategori-kategori dan tema-tema, 5) menyajikan data secara naratif, dan 6) menginterpretasi data.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

SMK N I ROTA Bayat didirikan pada tanggal 17 Desember 2009 dan memulai pembelajaran pada tahun ajaran 2009/2010. Sekolah ini dibangun dengan kemitraan antara *NGOs Reach Out To Asia* (ROTA) dari kerajaan Qatar dan Pemerintah Kabupaten Klaten. Dalam kemitraan ini, ROTA mewakilkan tugasnya kepada *NGOs Titian Foundation*. Adapun latar belakang kemitraan tersebut adalah adanya keinginan *NGOs ROTA* dan *NGOs TF* untuk berkontribusi dalam melakukan *recovery* masyarakat korban gempa bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Klaten melalui bidang pendidikan.

Bentuk kemitraan tersebut adalah pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan tanah untuk lokasi pendirian gedung sekolah dan menyediakan pegawai negeri sipil (PNS). Sementara *NGOs TF* membiayai pembangunan gedung sekolah beserta fasilitasnya dan membantu manajemen kurikulum kejuruan. Hasil penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi manajemen kurikulum berbasis ke-

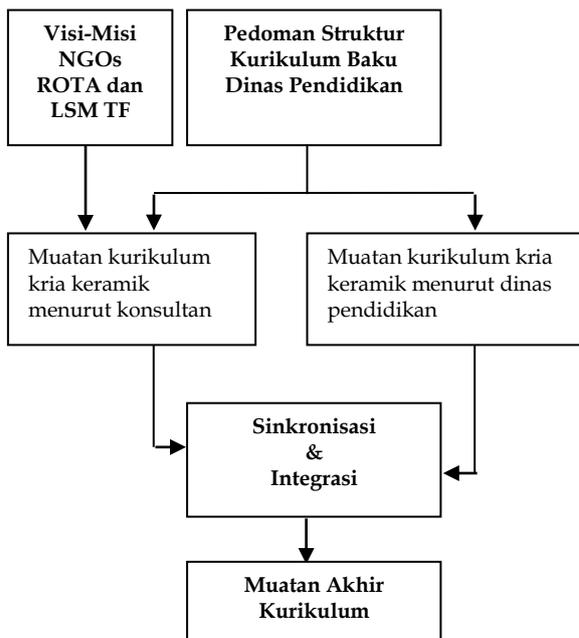
mitraan dilihat dari aspek perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan pengawasan kurikulum.

### Perencanaan Kurikulum Berbasis Kemitraan di SMK N I ROTA Bayat.

Perencanaan kurikulum kejuruan kria keramik di SMK N I ROTA Bayat dilakukan tahun 2009 dengan kemitraan antara *NGOs TF* dan sekolah. *NGOs TF* diwakili oleh tenaga ahli yang selanjutnya disebut konsultan kurikulum dan sekolah diwakili tim pengembang kurikulum kejuruan kria keramik yang terdiri dari para guru dan kepala program keahlian kria keramik. Dengan berpegang pada panduan umum tentang kurikulum kejuruan yang dibuat Dinas Pendidikan Klaten, konsultan menyusun kurikulum yang akan diajarkan dalam pembelajaran kejuruan di sekolah. Setelah kurikulum terbentuk kemudian diserahkan kepada tim pengembang kurikulum agar dibaca, dipelajari, dipahami, dan dicocokkan dengan rancangan kurikulum versi mereka. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi jika dirasa ada hal yang kurang sesuai atau memerlukan penjelasan. Dengan demikian, proses perencanaan kurikulum menggunakan pendekatan yang bersifat *administrative approach* yang banyak tergantung pada inisiatif konsultan.

Dalam sisi yang lain tim pengembang kurikulum juga menyusun muatan kurikulum kejuruan. Meskipun mendasarkan pada panduan yang sama, akan tetapi fakta di lapangan ada perbedaan dalam muatan kurikulum yang disusun konsultan dengan tim pengembang kurikulum. Muatan kurikulum dari konsultan isinya menekankan kemampuan peserta didik untuk menguasai keteknikan secara benar dalam bidang kejuruan kria keramik, sementara muatan kurikulum dari tim pengembang kurikulum isinya menekankan penguasaan kompetensi dasar lulusan SMK sesuai yang digariskan dinas pendidikan yakni peserta didik mampu berinovasi, berkreasi, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan

memiliki jiwa *entrepreneurship* dalam bidang kejuruan kria keramik. Oleh karena itu, proses penyusunan kurikulum dilakukan dengan mengintegrasikan substansi atau muatan kurikulum dari konsultan dan tim pengembang kurikulum. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Pengintegrasian Muatan Kurikulum Kria Keramik Berbasis Kemitraan

Dalam proses pengintegrasian kurikulum, pada awalnya konsultan berpendapat bahwa kurikulum yang disusunnya “tidak boleh dirubah” dan harus diajarkan secara keseluruhan. Namun demikian, oleh tim pengembang kurikulum tersebut tetap dikaji dan jika ditemukan ada yang kurang sesuai akan disampaikan kepada konsultan. Dalam proses diskusi dan debat yang panjang, akhirnya diperoleh kesepakatan tentang bentuk akhir kurikulum yang akan dipergunakan yakni kurikulum dari konsultan diintegrasikan dengan kurikulum dari dinas pendidikan. Muatan kurikulum dari konsultan yang mengutamakan pada keteknikan yakni bagaimana seorang peserta didik dapat membuat keramik dari A sampai Z dengan sempurna akan dijadikan *core* pembelajaran, tetapi juga harus

memfasilitasi agar peserta didik dapat membuat produk yang dapat diterima tuntutan pasar dan memiliki jiwa *entrepreneurship*.

Untuk menyinkronkan dan mengintegrasikan muatan kurikulum yang dibuat konsultan dengan yang digariskan dinas pendidikan dilakukan beberapa langkah yakni: (1) tim pengembang kurikulum sekolah secara intensif berdiskusi dengan konsultan kurikulum terkait materi yang akan diajarkan, 2) sinkronkan materi dengan melakukan pengecekan dan pemerhatian untuk mengetahui materi mana yang memiliki kesamaan dan perbedaan, 3) berdasarkan pengalaman guru di lapangan, apabila ada materi dari konsultan yang terlalu melebar dari silabus dinas pendidikan maka para guru akan menyampaikan ke konsultan untuk menemukan solusi bersama-sama.

Secara formal (tertulis) kurikulum kria keramik dibuat sama dengan standar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Klaten guna mencegah terjadinya permasalahan dalam regulasi. Namun demikian, secara riil dalam tataran implementasi justru alur kurikulum yang dari konsultanlah yang dijadikan pegangan utama. Hal ini karena isi kurikulum dari konsultan dianggap lebih komprehensif dan sudah mencakup pula isi kurikulum dari dinas pendidikan serta ada tambahan materi-materi pengembangan yang lain sehingga kurikulumnya menjadi lebih kaya.

Dengan demikian, produk akhir kurikulum yang disusun dengan kemitraan antara konsultan dengan tim pengembang kurikulum sekolah tidak diwujudkan secara tertulis (*implicit*) namun lebih ditekankan dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, bergantung pada bagaimana kreativitas guru untuk membimbing peserta didik agar memahami cara membuat keramik yang benar secara keteknikan sesuai yang diajarkan konsultan dan juga memahami cara menjual produk/karyanya ke pasar sesuai kompetensi dasar lulusan SMK yang digariskan dinas pendidikan. Sebagai contoh, konsultan mengajarkan peserta didik membuat tabung de-

ngan cara-cara yang benar, tapi para guru kemudian menambahkan agar tabung tadi menjadi lebih indah dan menarik misalnya dengan dibuat rak pensil, dihias, dll. Kemudian pelajaran membuat kotak seperti dalam kurikulum yang diajarkan konsultan, setelah kotaknya jadi para guru kemudian menambahkan agar dibuat menjadi vas bunga, tempat pensil, dll; sehingga dapat dijual ke masyarakat untuk melatih jiwa *entrepreneurship* peserta didik. Intinya, kurikulum yang direncanakan di sekolah ini adalah untuk mengajarkan agar peserta didik bisa berkarya tanpa meninggalkan unsur keteknikan yang benar dan mampu menambahkan sentuhan selera pasar dalam karya mereka. Jadi, baik muatan kurikulum dari konsultan dan dinas pendidikan semuanya bisa diajarkan pada peserta didik.

Faktor penting lainnya dalam proses perencanaan kurikulum adalah pelestarian kearifan budaya lokal. Konsultan menginginkan agar kurikulum sekolah mampu menjadi pelestari budaya lokal sehingga dia memasukan pelajaran "teknik keramik putaran miring" ke dalam rancangan kurikulumnya. Teknik ini merupakan warisan asli masyarakat Bayat Kabupaten Klaten yang prosesnya masih bersifat tradisional (*manual*). Dalam kurikulum versi konsultan, materi tersebut akan diajarkan sejak kelas 1 hingga kelas 3. Hal ini tidak disetujui oleh sekolah karena dalam standar kurikulum dari dinas pendidikan materi tersebut tidak termasuk yang harus diajarkan kepada peserta didik jurusan kria keramik. Menurut panduan kurikulum dari dinas pendidikan materi SMK justru diharapkan memperbanyak sentuhan teknologi, cakap, dan cepat dalam membuat produk. Selain itu, menurut sekolah pengajaran teknik tersebut membutuhkan peralatan cukup banyak dan membutuhkan waktu yang lama. Namun demikian, akhirnya diperoleh kesepakatan bersama bahwa materi tersebut dimasukan sebagai kurikulum muatan lokal.

Pengorganisasian Kurikulum Berbasis Kemitraan di SMK N I ROTA Bayat.

Pengorganisasian kurikulum praktik kria keramik berbasis kemitraan di SMK N I ROTA Bayat dilakukan dengan pendekatan struktural (manajemen) dan pendekatan fungsional (akademik). Dalam pendekatan struktural, dilakukan pengelompokan diantara berbagai orang-orang yang terlibat dalam perencanaan kurikulum. Sementara dalam pendekatan fungsional, dilakukan pengelompokan kurikulum menjadi komponen dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. Dengan kata lain, pengorganisasian kurikulum praktik kria keramik dilakukan dengan cara 1) mengelompokkan SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya pada kurikulum praktik, dan 2) mengelompokkan kegiatan praktik sesuai dengan jenis praktik dan waktu pelaksanaan.

Pengorganisasian kurikulum dipimpin dan dikoordinatori oleh wakasek kurikulum dengan anggota wakasek sarpras, kepala proli kria keramik dan kepala bengkel kria keramik. Wakasek kurikulum adalah penanggung jawab dalam pengorganisasian kurikulum praktik, namun secara faktual tugasnya sebatas melakukan koordinasi secara administratif. Hal ini dikarenakan yang bersangkutan tidak mengetahui tentang seluk beluk kurikulum praktik. Oleh karena itu, secara faktual tugas pengorganisasian kurikulum praktik banyak dikoordinasi oleh kepala proli.

Kurikulum praktik diorganisasikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. Dasar kompetensi kejuruan terdiri dari 8 (delapan) kompetensi dan kompetensi kejuruan terdiri dari 12 (dua belas) kompetensi. Materi pembelajaran untuk kedua komponen tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi keahlian untuk memenuhi standar kompetensi di dunia kerja.

Pengorganisasian materi pembelajaran praktik, materi-materi dikelompokkan tiap jenjang (kelas) didasarkan pada tingkat kesulitan dan kedalamannya. Mata

pelajaran praktik kelas X masih bersifat dasar dan bertujuan membekali peserta didik dengan dasar-dasar pembuatan keramik. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi familier dengan keramik. Materi praktik kelas XI bersifat medium dengan tujuan membekali peserta didik mampu agar membuat produk dengan alat cetak dan mampu membuat alat cetak sederhana. Kemudian untuk materi pembelajaran praktik peserta didik kelas XII sudah merupakan tingkat lanjut dan sudah pada tahap *finishing* keramik. Dalam pengelompokan ini, kepala proli juga mengadakan diskusi informal dengan konsultan kurikulum terutama untuk mengkoordinasikan pengaturan jam praktikum.

Peserta didik kelas X pada semester I memperoleh jam praktik mapel dasar kompetensi kejuruan (DKK) sebanyak 4 jpl/minggu dan mapel kompetensi kejuruan (KJ) 13 jpl/minggu, sementara pada semester II memperoleh jam pelajaran praktik mapel DKK sebanyak 3 jpl/minggu dan mapel KJ 14 jpl/minggu. Untuk peserta didik kelas XI pada semester I memperoleh jam pelajaran praktik mapel DKK sebanyak 2 jpl/minggu dan mapel KJ 15 jpl/minggu, sementara pada semester II tidak memperoleh jam pelajaran praktik mapel dasar kompetensi kejuruan tapi memperoleh mapel KJ 17 jpl/minggu. Sedangkan untuk peserta didik kelas XII peserta didik tidak lagi memperoleh mapel DKK, tetapi masih memperoleh mapel KJ sebanyak 19 jpl/minggu pada semester I dan II. Pembagian jam ini memiliki sifat yang fleksibel, dalam arti bisa bertambah dan berkurang menyesuaikan kondisi di lapangan terutama untuk mengakomodasi mata pelajaran pengembangan yang diberikan oleh konsultan kurikulum.

Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kemitraan di SMK N I ROTA Bayat.

Kurikulum kria keramik yang telah direncanakan dan diorganisasikan kemudian dilaksanakan dengan kemitraan antara sekolah dengan konsultan kurikulum. Proses pelaksanaan kurikulum dimulai

dengan pemberian berbagai *training* dan penataran bagi guru praktik kria keramik, karena para guru belum berpengalaman dalam mengajar dan masih memiliki banyak kekurangan dalam berbagai kompetensi lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan beberapa saat sebelum proses pembelajaran resmi dimulai dan sebelum guru mulai aktif mengajar. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah dan institusi mitra memberikan perhatian terhadap kualitas tenaga pendidik sehingga mereka harus dipersiapkan dengan baik sebelum mulai mengajar.

Peran yang dilakukan sekolah dalam menyiapkan tenaga pendidik sebelum mereka mulai mengajar adalah: 1) melakukan sosialisai visi-misi sekolah agar ada kesepahaman bersama dengan seluruh warga sekolah; 2) memberikan pembekalan bagi para guru tentang tupoksi guru sebagaimana yang digariskan oleh Depdikbud dengan tujuan agar para guru memahami tentang makna tanggung jawab sebagai guru, kewenangan guru, tugas-tugas guru; 3) memberikan pengenalan tentang dasar-dasar pengembangan kurikulum dan penjelasan tentang kurikulum KTSP yang diterapkan di sekolah beserta beragam perkembangan kurikulum kria keramik. Sementara peran yang dilakukan konsultan adalah membantu mempersiapkan peningkatan kompetensi mengajar guru dengan memberikan berbagai penataran, diantaranya pengembangan materi pembelajaran, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), melaksanakan kurikulum, membimbing cara mengajar yang baik, dan kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran.

Pembagian peran antara sekolah dengan konsultan ini menunjukkan bahwa dalam mempersiapkan tenaga pendidik sebelum mereka mulai mengajar adalah selaras dengan model kemitraan "*complementary*" sebagaimana dinyatakan oleh Brisard, Menter, & Smith (2005: 14). Dalam model kemitraan ini, masing-masing pihak yang bermitra memiliki peran yang berbeda dan terpisah, tetapi saling mengisi dan ketika digabungkan akan memberikan pengalaman yang lengkap buat guru.

Dalam proses pembelajaran guru memiliki kewenangan penuh untuk mengelola kelas. Konsultan memberikan kebebasan kepada para guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengimplementasikan kurikulum. Konsultan ikut mengajar secara langsung hanya ketika mengajarkan teknik-teknik yang berasal dari Jepang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses pembelajaran konsultan memposisikan diri sebagai supervisor bagi guru, yang bertugas memberikan bantuan dan bimbingan ketika guru mengalami kesulitan.

Kegiatan supervisi pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan konsultan, secara lengkap meliputi: 1) kemampuan melaksanakan kurikulum, yang berkenaan dengan pelaksanaan proses belajar-mengajar; 2) kemampuan memilih dan menggunakan material kurikulum, khususnya berkenaan dengan media instruksional dan bahan-bahan belajar; 3) kemampuan memberikan pelayanan terhadap perbedaan individual peserta didik dengan memperhatikan perilaku awal, kemampuan, bakat, dan minat; 4) kemampuan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dalam bidang kejuruan; dan 5) kemampuan memecahkan masalah-masalah khusus, misalnya disiplin peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

Dengan pendanaan dari NGOS TF, konsultan juga membantu membuat dan membelikan peralatan praktik sekaligus mengajarkan penggunaannya kepada guru. Peran ini sangat membantu sekolah mengingat keterbatasan anggaran yang ada dan lambatnya bantuan pendanaan dari pemerintah Kabupaten Klaten kadang membuat proses pembelajaran praktik menjadi terganggu. Dengan demikian, senada dengan hasil penelitian dari Karen Mundy & Caroline Manion (2008) bahwa adanya kemitraan antara sekolah dengan NGOs sering memegang peranan kunci dalam mendukung pengembangan pendidikan terutama dalam pemberian dukungan material (pendanaan), pelatihan-pelatihan pengembangan kurikulum.

Dalam pelaksanaan kurikulum, konsultan dan guru berupaya mengembangkan jalinan komunikasi yang efektif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keharmonisan dalam mengajar, terbentuk kesesuaian visi-misi dalam implementasi kurikulum, dan meminimalkan kesulitan-kesulitan para guru dalam mengimplementasikan kurikulum. Hal ini sangat baik karena tujuan pembelajaran yang telah direncanakan hanya akan terwujud manakala para tenaga pendidiknya kompak dan harmonis. Untuk mewujudkan hal ini dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: evaluasi bersama terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan konsultan memberikan dorongan positif bagi para guru meliputi memberikan motivasi, memberikan pujian, teguran tidak langsung, insentif, keteladanan dan melakukan berbagai tindakan *persuasive*.

Guru dan konsultan juga mengarahkan peserta didik untuk belajar secara langsung dalam proses pembuatan keramik di sentra industri keramik Desa Pagerjuran. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi dan *skills* mereka. Pola pembelajaran tersebut sangat sesuai dengan prinsip kerja pendidikan kejuruan yang dijelaskan Finch & Crunkilton (2009) yang mengatakan bahwa pendidikan kejuruan akan efektif dan efisien jika lingkungan dimana peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan dimana nanti peserta didik akan bekerja dan akan efektif jika tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat dan mesin yang sama seperti yang ditetapkan di tempat kerja dan mampu melatih peserta didik dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.

Untuk lebih meningkatkan *link and match* antara sekolah dengan DU/DI, maka sekolah dan NGOS TF melakukan kerja sama kemitraan dalam praktik kerja industri (prakerin) peserta didik. Prakerin bertujuan untuk menerapkan teori maupun praktik yang diajarkan di sekolah dengan situasi nyata dalam industri, agar kelak

lulusan menjadi sumber daya yang siap pakai di masyarakat.

Dalam kemitraan ini, *NGOS TF* berperan mencari lokasi prakerin dan membantu dalam pembiayaan bagi 10 (sepuluh) peserta didik terbaik di kelas. Sementara sekolah berperan mengurus semua keperluan administrasi peserta didik. Kegiatan kemitraan dalam prakerin ini tergolong sebagai model model kemitraan donasi sebagaimana klasifikasi yang diberikan oleh Mawhinney (1993: 2-3) yakni model kemitraan yang berupa sumbangan finansial atau nonfinansial untuk mendukung suatu program atau layanan.

Kendala terbesar dalam pelaksanaan kurikulum adalah keterbatasan waktu. Kurikulum pengembangan hasil kemitraan membutuhkan durasi waktu yang banyak dalam pelaksanaannya, sementara jumlah waktu yang tersedia terbatas. Sebagaimana ketentuan dari dinas pendidikan yakni untuk kurikulum dasar kompetensi kejuruan maksimal 140 jam dan kompetensi kejuruan 1044 jam. Oleh karena itu dilakukan koordinasi intensif dengan konsultan untuk mengurangi durasi waktu tiap jam pelajaran.

Pengawasan Kurikulum Berbasis Kemitraan di SMK N I ROTA Bayat.

Kegiatan pengawasan kurikulum dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran dapat dicapai dan pekerjaan-pekerjaan dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan pengawasan, pengelola kurikulum mengawasi dan menilai kinerja aktual pelaksanaan kurikulum dan membandingkan dengan parameter yang digariskan. Dengan demikian pengawasan juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan kurikulum yang diterapkan.

Pengawasan kurikulum dilakukan oleh para guru yang mengajar praktik kria keramik dan konsultan kurikulum. Guru melakukan pengawasan karena merupakan bagian tupoksinya, sementara konsultan melakukannya karena menjadi merupakan *job description* yang harus dipenuhi dalam kontrak kerja dengan *NGOS TF*.

Dengan demikian pengawasan merupakan instrumen pimpinan kurikulum untuk meyakinkan bahwa seluruh sistem berfungsi dengan efisien dan efektif. Apabila terjadi kesulitan, kesalahan, penyimpangan, maka tindakan yang bersifat pembinaan, pelurusan, dan koreksi dapat dilakukan sehingga sistem kurikulum berfungsi normal kembali atau dengan kata lain hasil pengawasan dapat dipergunakan oleh pimpinan untuk melakukan supervisi bagi para guru.

Ada 2 (dua) jenis pengawasan yang dilakukan, yakni pengawasan administratif dan nonadministratif. Pengawasan secara administratif dilakukan dengan menggunakan instrumen pemantauan kurikulum yang disusun berdasarkan silabus. Dengan silabus kemudian dibuat berbagai macam instrumen pemantauan, baik yang berbentuk *checklist* untuk mengetahui apakah guru membuat RPP, program semester ataupun program tahunan, dll. Sementara pengawasan nonadministratif dilakukan dengan observasi partisipan terhadap kegiatan pembelajaran.

Pengawasan secara administratif banyak dilakukan oleh wakasek kurikulum dan para guru praktik. Sementara konsultan kurikulum melakukan pengawasan secara nonadministratif dilakukan melalui observasi partisipan terhadap proses pembelajaran. Dalam kegiatan observasi partisipan tersebut, konsultan sekaligus melakukan supervisi bagi guru. Apabila dalam pengamatannya ditemukan ada kekurangan dalam guru mengajar maka setelah jam pelajaran usai konsultan akan memberikan arahan dan bimbingan.

Bentuk kerja sama kemitraan dalam pengawasan kurikulum antara sekolah dengan konsultan kurikulum adalah bersama-sama memastikan agar pelaksanaan kurikulum telah sesuai dengan yang direncanakan. Peran sekolah banyak pada sisi administratif termasuk pemberian *punishment* pada guru jika administrasi kurikulum belum terpenuhi dan berhubungan langsung dengan pengawasan kemampuan peserta didik menyerap materi. Sementara konsultan berperan hanya manakala dite-

mukan ada hal yang dirasa tidak sesuai dengan yang direncanakan atau diharapkan. Konsultan tidak memiliki wewenang untuk melakukan *punishment* terhadap guru, namun berwenang memberikan umpan balik yang positif untuk perbaikan kinerja guru.

Dalam lingkup mikro proses pembelajaran, bentuk pengawasan yang dilaksanakan adalah dengan mengadakan evaluasi harian setelah mengakhiri proses pembelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan oleh guru secara rutin. Sementara konsultan menjalankan peran pengawasan proses pembelajaran secara berkala. Pada akhir bulan, guru dan konsultan mendiskusikan hasil pengamatan masing-masing tentang jalannya pembelajaran, mengevaluasi grafik pencapaian nilai masing-masing peserta didik dan mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran.

Kerja sama kemitraan dalam pengawasan kurikulum ini sangat baik karena selaras dengan model kemitraan "*complementary*" sebagaimana dinyatakan oleh Brisard, Menter, & Smith (2005: 14), yakni kemitraan yang mana masing-masing mitra (*partner*) mengambil peran secara terpisah dan berbeda, namun suatu saat digabungkan untuk menghasilkan hal yang positif. Model kemitraan ini dirasa cocok untuk pengawasan kurikulum karena tidak terlalu mengganggu proses pembelajaran.

Berdasarkan evaluasi diketahui bahwa peserta didik dari SMK Negeri I ROTA Bayat memiliki keunggulan dalam sisi keteknikan dan lebih inovatif dibandingkan dengan peserta didik dari sekolah lain. Keunggulan ini salah satunya karena kuatnya pengaruh muatan kurikulum dari konsultan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Antone Gonsalves (2003) yang menyimpulkan bahwa dengan adanya jalinan kemitraan yang baik antara sekolah dengan mitra, maka akan meningkatkan mutu proses pendidikan dan kualitas lulusan (*output*).

## Simpulan dan Saran

### Simpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan kurikulum dilakukan melalui kerja sama kolaboratif antara sekolah dengan konsultan kurikulum, dengan cara mengintegrasikan muatan kurikulum produktif dari dinas pendidikan dan NGOs TF. Muatan kurikulum dari dinas pendidikan menekankan kemampuan peserta didik untuk memiliki jiwa *entrepreneurship*, inovatif, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar; sedangkan muatan kurikulum dari NGOs TF menekankan kemampuan peserta didik untuk menguasai keteknikan secara benar dalam bidang kria keramik.
2. Pengorganisasian kurikulum dilakukan dengan pendekatan struktural (manajemen) dan pendekatan fungsional (akademik). Pendekatan struktural dilakukan dengan mengelompokkan SDM sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam kurikulum praktik; sementara pendekatan fungsional dilakukan dengan mengelompokkan kurikulum menjadi sejumlah mata pelajaran yang dikelompokkan dalam dasar kompetensi kejuruan dan kompetensi kejuruan. Materi pembelajaran praktik dikelompokkan tiap jenjang (kelas) didasarkan pada tingkat kesulitan atau kedalamannya, dan kegiatan praktik dikelompokkan sesuai dengan jenis praktik dan waktu pelaksanaan.
3. Pelaksanaan kurikulum dilakukan dengan kerja sama kolaboratif antara guru praktik dan konsultan kurikulum. Guru praktik berperan melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan dan mengelola proses pembelajaran; sementara konsultan berperan memberikan berbagai *training* dan penataran untuk guru sebelum mereka mulai mengajar, mengajarkan

kepada peserta didik tentang beragam teknik praktik yang berasal dari Jepang, dan memberikan supervisi bagi guru dalam pelaksanaan kurikulum.

4. Pengawasan kurikulum dilakukan dengan kerja sama *complementary* antara wakasek kurikulum, guru mata pelajaran produktif, dan konsultan kurikulum. Wakasek kurikulum berperan melakukan pengawasan dalam aspek administratif dengan menggunakan instrumen pemantauan kurikulum, sedangkan guru mapel produktif dan konsultan kurikulum melakukan pengawasan dalam aspek nonadministratif melalui observasi partisipan terhadap proses pembelajaran. Dalam 1 (satu) bulan sekali guru dan konsultan mendiskusikan hasil pengawasan yang telah diperoleh.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diajukan beberapa saran:

1. Sekolah disarankan menjalin kerja sama dengan praktisi dari DU/DI dalam kegiatan perencanaan kurikulum untuk meningkatkan *link and match* antara kurikulum produktif dengan perkembangan teknologi di industri.
2. Pengorganisasian mata pelajaran produktif disarankan tidak hanya didasarkan pada tingkat kesulitan atau kedalamannya, namun juga mempertimbangkan durasi waktu yang dibutuhkan dalam mengajarkannya dan tingkat keterkaitan dengan kelompok mata pelajaran adaptif.
3. Guru praktik dan konsultan kurikulum disarankan untuk mempertahankan komunikasi yang sudah baik selama proses pelaksanaan kurikulum; dan sekolah disarankan mengundang praktisi dari DU/DI untuk memberikan *training* bagi guru mapel produktif tentang penggunaan berbagai teknik dan peralatan modern dalam pembuatan keramik.

4. Sekolah disarankan membakukan dan memberikan instrumen pemantauan kurikulum kepada setiap guru agar mereka mampu melakukan kontrol diri terhadap kinerjanya; guru dan konsultan hendaknya meningkatkan frekuensi dalam melakukan evaluasi bersama terhadap proses pembelajaran.

#### Daftar Pustaka

- Brook, S., & Simkins, M. (1999). The curriculum management creatures (Versi elektronik). *Technology & learning*, Vol.20, 6-10.
- Brisard, Estelle., Menter, Ian., Smith, Ian. (2005). *Models of partnership in programmes of initial teacher education*. Scotland: School Of Education; The University Of Paisley.
- Creswell, John W. (2009). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3<sup>th</sup> ed)*. California: SAGE Publications, Inc.
- Departemen Dalam Negeri. (2004). *Undang-Undang RI No 32, Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah*.
- Fasli Jalal & Dedi Supriadi. (Eds.). (2001). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Finch, Curtis R., & Crunkilton, John R. (1999). *Curriculum development in vocational and technical education: planning, content, and implementation (5<sup>rd</sup> ed.)*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Glatthorn, Allan., Boschee, Floyd., & Whitehead, Bruce M. (2009). *Curriculum leadership: Strategies for development and implementation (2<sup>rd</sup> ed.)*. California: Sage Publication, Inc.
- Gonsalves, Antone. (2003). The power of partnerships (Versi elektronik). *Technology & Learning*, 7, 16-26. Diakses pada 14 Juli 2012, dari <http://search.proquest.com/docvie>

- [w/212083412/137E9DFAB065987BE5C/1?accountid=31324](http://www.nald.ca/library/learning/partner/page19.htm).
- Mawhinney. (1993). *Definition and rationale for partnerships*. Diakses pada 12 Desember 2012, dari <http://www.nald.ca/library/learning/partner/page19.htm>
- Mundy, Karen., & Manion, Caroline. (2008). Global Education in Canadian Elementary Schools: An Exploratory Study (Versi elektro-nik). *Canadian Journal of Education*, 31, 941-974. Diakses pada 15 Juli 2012, dari <http://search.proquest.com/docview/215369243/1380D9F061469ABF87C/2?accountid=31324>
- Oemar Hamalik. (2008). *Manajemen pengembangan kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya-Sekollah Pascasarjana UPI.
- Ornstein, Allan C., & Hunkins, Francis P. (2004). *Curriculum: Foundations, principles, and issues (4<sup>rd</sup> ed.)*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Suharsimi Arikunto. (2009). *Manajemen kurikulum*. Yogyakarta: FIP UNY.
- Tomassini, Jason. (2012). Johns Hopkins Forges Ed. Industry Partnership (Versi elektronik). *Education Week*, 31, 8. Diakses pada 27 Juli 2012, dari <http://search.proquest.com/docview/928929282/137F4BD2F68391858F4/18?accountid=31324>